

PENAFIAN

LSM Koalisi Hutan UK telah menerjemahkan dokumen-dokumen konsultasi tentang uji tuntas yang kami terima dari DEFRA: <https://consult.defra.gov.uk/eu/duo-diligence-on-forest-risk-commodities/>. Ini dilakukan secara sukarela dan independen dari pemerintah UK untuk membantu para mitra kami dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lain yang tidak dihubungi secara langsung oleh pemerintah.

Meskipun kami telah berupaya melakukannya dengan seteliti mungkin, kami tidak dapat menjamin keakuratan terjemahan dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau penghapusan yang terjadi dalam proses penerjemahan.

Catat:

- Jika Anda bermaksud mengirimkan respons, kirimkan langsung kepada pemerintah UK, dengan mengikuti petunjuk dalam dokumen-dokumen konsultasi, karena kami tidak akan dapat mengirimkannya atas nama Anda;**
 - Kami memahami bahwa pemerintah UK mewajibkan semua respons dibuat dalam bahasa Inggris, dan Anda harus menyiapkannya sendiri. Sayangnya, Koalisi tidak dapat menyediakan penerjemahan dari respons.**
 - Kami menerima jika terjemahan ini dibagikan kepada pihak lain, tetapi harus dibagikan dengan dasar sebagaimana disebutkan di atas.**
-

Konsultasi uji tuntas tentang komoditas hutan berisiko Dokumen konsultasi

Agustus 2020



© Hak Cipta Crown 2020

Informasi ini memiliki lisensi Open Government Licence v3.0. Untuk melihat lisensi ini, kunjungi www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/

Publikasi ini tersedia di www.gov.uk/government/publications

Pertanyaan apa pun tentang publikasi ini harus dikirimkan kepada kami di

Due.Diligence@defra.gov.uk

www.gov.uk/defra

Isi

Pendahuluan	4
Bagaimana dan mengapa kami berkonsultasi?	5
Cara merespons	5
Kerahasiaan dan perlindungan data	5
Tingkat-tingkat pemerintahan yang menerima devolusi	6
Dasar pemikiran	7
Mengapa berfokus pada komoditas?	7
Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa komoditas diproduksi secara lebih berkelanjutan? ...	7
Apa lagi yang dapat dilakukan?	8
Usulan	9
Menggunakan undang-undang untuk menetapkan kewajiban perusahaan-perusahaan	10
Mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa komoditas telah diproduksi secara sah ...	10
Peraturan perundang-undangan terkait	11
Menyasar perusahaan-perusahaan utama	11
Pertanyaan-pertanyaan konsultasi	12
Bagian A: Tentang Anda	12
Bagian B: Tentang organisasi Anda	12
Bagian C: Tentang bisnis Anda	12
Bagian D: Tentang usulan	15
Bibliografi	17

Pendahuluan

Sangat penting bahwa pemulihan dari COVID-19 membantu kita membangun ekonomi global yang lebih ramah lingkungan, lebih adil, dan lebih tangguh. Melindungi lingkungan hutan yang berharga berperan sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim, memastikan bahwa manusia memiliki penghidupan yang aman dan melindungi sistem alam yang dapat kita andalkan untuk makanan yang kita santap, air yang kita minum, dan udara yang kita hirup. Perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab telah memimpin jalan untuk menetapkan rantai pasokan berkelanjutan untuk melindungi hutan, dan kebijakan ini bertujuan untuk mendukung dan memperkuat upaya-upaya tersebut.

Kami meluncurkan konsultasi ini untuk mengetahui pendapat Anda tentang apakah Pemerintah harus membuat undang-undang baru yang dirancang untuk mencegah konversi hutan dan daerah alami penting lainnya secara ilegal menjadi lahan pertanian.

Undang-undang yang kami usulkan akan berjalan dengan mewajibkan relatif sejumlah kecil perusahaan besar untuk memastikan bahwa komoditas ‘hutan berisiko’ yang mereka gunakan – komoditas yang dapat menyebabkan deforestasi dalam skala besar – sudah diproduksi secara sah. Alasannya adalah sebagian besar aksi pembukaan wilayah hutan untuk memproduksi komoditas tersebut tidak dianggap sah¹.

Perusahaan-perusahaan besar memiliki kemungkinan lebih besar untuk berpengaruh dalam mengirimkan sinyal positif kepada para produsen, dan dengan demikian berada dalam lingkup usulan ini. Usulan kami akan mengilegalkan penggunaan oleh perusahaan-perusahaan besar atas komoditas hutan berisiko yang belum diproduksi sesuai dengan peraturan setempat terkait, dan perusahaan-perusahaan besar ini harus mengambil langkah-langkah (melakukan uji tuntas) untuk menunjukkan bahwa mereka sudah melakukan tindakan yang proporsional untuk memastikan hal tersebut. Ini akan menetapkan kewajiban yang jelas bagi perusahaan-perusahaan, dan siapa pun yang tidak mematuhi akan dikenakan denda.

Mengetahui pentingnya deforestasi dalam rantai pasokan, pada tahun 2019 Pemerintah membentuk gugus tugas independen yang dinamai Global Resource Initiative sebagai bagian dari Rencana Lingkungan 25 Tahun kami. Global Resource Initiative mempertimbangkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh UK untuk membuat rantai pasokan internasional menjadi lebih ramah lingkungan, dan meninggalkan jejak yang lebih ringan pada lingkungan hidup global. Global Resource Initiative menyerahkan [laporan rekomendasi akhir](#) kepada Pemerintah pada Maret tahun ini: salah satu rekomendasi utamanya adalah Pemerintah harus menerapkan kewajiban uji tuntas. Konsultasi ini dirancang untuk menginformasikan tanggapan Pemerintah atas rekomendasi tersebut.

Bagaimana dan mengapa kami berkonsultasi?

Konsultasi ini mengemukakan usulan kami dan menanyakan pendapat tentang apakah kami menggunakan prinsip-prinsip yang benar untuk memandu pendekatan kami, dan dampaknya pada bisnis dan kepentingan-kepentingan lain. Ini bukan usulan akhir. Tujuan konsultasi ini adalah agar kami dapat mendengar dari berbagai pemangku kepentingan di UK dan di dunia tentang prinsip-prinsip umum usulan kami agar kami dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan utama di masa mendatang dirancang dengan benar.

Kami akan memublikasikan laporan di gov.uk yang meringkas masukan-masukan yang kami terima setelah konsultasi ditutup. Ini akan dilengkapi dengan penilaian dampak lengkap, yang akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diterima melalui konsultasi dalam mempertimbangkan biaya yang mungkin menjadi beban perusahaan-perusahaan.

Penting untuk mengingat bahwa jika Pemerintah memutuskan untuk menetapkan undang-undang, kami akan berkonsultasi lagi untuk menunjang peraturan sekunder yang menetapkan jenis komoditas yang akan kami masukkan, dan kapan kami menentukan detail kerangka kerja langkah-langkah uji tuntas yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan.

Global Resource Initiative memanfaatkan beragam keahlian dari berbagai bisnis, keuangan, dan masyarakat sipil. Semua rekomendasi GRI disusun berdasarkan penilaian cermat atas bukti, serta komunikasi dengan beragam pemangku kepentingan. Konsultasi ini memanfaatkan penilaian tersebut dan pengumpulan bukti yang lebih luas.

Cara merespons

Kirim respons konsultasi Anda dengan menggunakan survei daring yang disediakan di Citizen Space (Citizen Space adalah alat konsultasi daring). Atau, kirim respons Anda melalui email ke Due.Diligence@defra.gov.uk, atau kirim respons Anda via pos ke:

Consultation Coordinator at Defra,
2nd Floor, Foss House,
Kings Pool, 1-2 Peasholme Green,
York,
YO1 7PX

Respons harus kami terima paling lambat pukul 23.59 pada 5 Oktober 2020. Konsultasi ini berlangsung selama 6 minggu.

Kerahasiaan dan perlindungan data

Setelah konsultasi, ringkasan respons akan dipublikasikan dan dimuat di situs web Pemerintah www.gov.uk/defra.

Informasi yang diberikan untuk menanggapi konsultasi ini, termasuk data pribadi, dapat dipublikasikan atau diungkapkan sesuai dengan akses ke peraturan tentang informasi. Peraturan tersebut terutama adalah Peraturan Informasi Lingkungan tahun 2004 (EIR), Undang-Undang.

Kebebasan Informasi tahun 2000 (FOIA), dan Undang-Undang Perlindungan Data tahun 2018 (DPA). Kami wajib, terutama berdasarkan EIR, FOIA, dan DPA, mengungkapkan informasi kepada penerima tertentu atau kepada masyarakat dalam kondisi tertentu.

Jika Anda ingin informasi yang Anda berikan diperlakukan rahasia, ketahui bahwa sebagai otoritas pemerintah, Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan terikat pada Undang-Undang Kebebasan Informasi dan oleh karena itu, wajib mengungkapkan seluruh atau sebagian informasi yang Anda berikan. Berdasarkan hal ini, kami akan terbantu jika Anda dapat menjelaskan alasan Anda menganggap informasi yang Anda berikan sebagai informasi rahasia. Jika kami menerima permintaan untuk mengungkapkan informasi tersebut, kami akan sangat mempertimbangkan penjelasan Anda, tetapi kami tidak dapat memastikan bahwa kerahasiaan dapat dijaga dalam semua kondisi. Penafian kerahasiaan otomatis yang dibuat oleh sistem TI Anda tidak akan dengan sendirinya dianggap mengikat Departemen Lingkungan Hidup, Pangan, dan Pedesaan.

Konsultasi ini dilakukan sesuai dengan
“Prinsip-Prinsip Konsultasi” Kantor Kabinet, yang dapat diperoleh di:
<https://www.gov.uk/government/publications/consultation-principles-guidance>.

Jika Anda memiliki komentar atau keluhan tentang proses konsultasi, kirimkan ke:

Consultation Coordinator at Defra,
2nd Floor, Foss House,
Kings Pool, 1-2 Peasholme Green,
York,
YO1 7PX

Atau email ke: consultation.coordinator@defra.gov.uk

Tingkat-tingkat pemerintahan yang menerima devolusi

Kebijakan lingkungan di Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara sebagian besar telah didevolusi, tetapi seperti disebutkan dalam konsultasi ini, usulan ini terkait dengan fakta bahwa kebijakan di Skotlandia dan Wales dipegang oleh Pemerintah UK dan Parlemen. Persyaratan khusus tersebut terkait dengan pembentukan, pengoperasian, pengaturan, dan pembubaran jenis-jenis asosiasi bisnis (UU Skotlandia tahun 1998: Lampiran 5 Bagian II, Pasal C1; UU Pemerintah Wales tahun 2006: Lampiran 7A Bagian 2, Pasal C1). Kami akan terus mengevaluasi ini untuk memastikan bahwa langkah apa pun yang diterapkan akan dilaksanakan sesuai dengan pembagian tanggung jawab berdasarkan UU Skotlandia dan UU Pemerintah Wales. Kami akan berkomunikasi dengan Pemerintah Skotlandia dan Wales dalam mempertimbangkan semua respons dalam konsultasi ini dan langkah-langkah kami berikutnya.

Di Irlandia Utara, Pemerintah dan Parlemen Irlandia Utara berwenang mengatur perusahaan-perusahaan (meskipun telah menyetujui peraturan tentang perusahaan yang berlaku di UK). Kami menganggap bahwa akan ada manfaat dari penerapan kewajiban uji tuntas yang berlaku di seluruh UK dan kami akan berkomunikasi dengan Pemerintah Irlandia Utara dalam mempertimbangkan semua respons dalam konsultasi ini. Pemerintah dan Parlemen Irlandia Utara akan memutuskan apakah kewajiban uji tuntas akan diterapkan di Irlandia Utara atau tidak.

Dasar pemikiran

Mengapa berfokus pada komoditas?

Hutan berperan sangat penting dalam kehidupan manusia dan bumi. Hutan memberikan penghidupan, bahan bakar, dan makanan bagi lebih dari satu miliar manusia², dan memberi kita berbagai jasa penting, seperti mengatur siklus air, membersihkan udara, dan mencegah erosi tanah. Hutan menyerap karbon, bertindak sebagai ‘wadah penyerap’ karbon yang menangkap miliaran ton karbon dioksida pemanas iklim per tahun³. Saat hutan dimusnahkan dan dirusak, karbon yang tersimpan dilepaskan ke udara. Saat ini, deforestasi adalah penyebab utama kedua perubahan iklim di dunia, setelah pembakaran bahan bakar fosil, dan merupakan penyebab atas sekitar 11% dari seluruh emisi gas rumah kaca⁴. Hutan sangat kaya dengan banyak spesies binatang dan tumbuhan, menjadi habitat bagi sekitar 80% dari keanekaragaman hayati di daratan di seluruh dunia, dan merupakan tempat tinggal bagi banyak spesies yang tidak ditemukan di tempat lain mana pun⁵. Oleh karena itu, membatasi deforestasi yang tidak terkendali merupakan langkah penting untuk melestarikan hutan sebagai sumber daya alam dan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan jangka panjang dari spesies binatang dan tumbuhan yang hidup di dalam hutan.

Dalam 60 tahun terakhir, lebih dari separuh hutan tropis di seluruh dunia telah dimusnahkan. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh konversi hutan menjadi lahan pertanian - perluasan lahan pertanian mendorong hampir 80% dari seluruh aksi penggundulan hutan⁶. Pertanian juga berkontribusi pada konversi berbagai jenis ekosistem alam lain, seperti padang rumput, lahan gambut, dan lahan basah^{7,8}, dan terdapat bukti yang terus bertambah bahwa pembukaan ekosistem alam memperburuk penyebaran penyakit menular⁹.

Konversi lahan secara ilegal merupakan penyebab signifikan dari deforestasi. Di seluruh dunia, hampir separuh (49%) dari seluruh penggundulan hutan tropis akhir-akhir ini adalah akibat dari pembukaan lahan secara ilegal untuk pertanian komersial dan perkebunan kayu. Di titik-titik panas penggundulan hutan, persentase ini jauh lebih tinggi¹. Tetapi, kecuali kayu dan produk kayu, saat ini tidak ada kewajiban hukum secara umum di UK bagi perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa komoditas yang mereka gunakan sudah diproduksi sesuai dengan peraturan setempat.

UK memakai tujuh komoditas dalam jumlah besar yang perkembangan cepatnya dihubungkan dengan deforestasi, dan yang sering bertentangan dengan peraturan setempat: daging sapi dan kulit sapi, kakao, kelapa sawit, bubur kertas dan kertas, kayu, karet dan kedelai. Makanan yang kita santap, kosmetik yang kita gunakan, produk pembersih yang kita pakai, dan kendaraan yang kita pakai untuk bepergian semua bergantung pada komoditas-komoditas ini. Komoditas hutan berisiko sering terkandung dalam produk-produk lain – contohnya, banyak binatang diberi pakan kedelai, sehingga kedelai terkandung dalam banyak produk daging dan susu, dan kelapa sawit digunakan sebagai bahan dalam berbagai produk di pasar swalayan.

Apa yang dapat dilakukan untuk memastikan bahwa komoditas diproduksi secara lebih berkelanjutan?

UK menyadari bagiannya dalam mengatasi deforestasi secara global dan bekerja di semua tahap rantai pasokan untuk meningkatkan keberlanjutan komoditas hutan berisiko.

Kami menandatangani Kemitraan Deklarasi Amsterdam, yang menjadi dasar bagi kami untuk bekerja dengan pemerintah negara lain di Eropa untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan komoditas. UK mengesahkan Deklarasi Hutan New York, yang bertujuan untuk mengatasi hilangnya hutan

dengan memperkuat perlindungan hutan yang masih utuh dan mendukung restorasi hutan dalam skala besar. Kami mendukung perusahaan-perusahaan di UK untuk meningkatkan keberlanjutan rantai pasokan mereka, mengadakan konferensi yang dipimpin oleh industri tentang kedelai dan kelapa sawit berkelanjutan. Perusahaan-perusahaan di sektor bioenergi dapat mengakses bantuan Pemerintah hanya jika mereka dapat membuktikan bahwa komoditas yang mereka gunakan memenuhi kriteria keberlanjutan. Pemerintah juga memberikan bantuan finansial melalui Pembiayaan Iklim Internasional untuk mempercepat peralihan ke produksi komoditas hutan berisiko utama yang lebih berkelanjutan dan menciptakan nilai untuk hutan yang masih ada. Lebih luas lagi, pekerjaan kami yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui rantai-rantai pasokan global yang kukuh berkontribusi pada tujuan Perjanjian Paris dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pengalaman kami selama bertahun-tahun telah menunjukkan bahwa kami mendapatkan hasil terbaik bagi manusia dan lingkungan saat kami bekerja erat dengan pemerintah-pemerintah negara dan masyarakat setempat untuk memperkuat upaya-upaya yang saat ini mereka lakukan. Karena pada akhirnya, merekalah yang memiliki ekosistem penting ini dan bergantung pada ekosistem ini untuk kehidupan mereka.

Contohnya, UK berperan penting dalam menyusun Rencana Aksi Penegakan Hukum, Tata Kelola, dan Perdagangan dalam Bidang Kehutanan (FLEGT). Rencana Aksi ini bekerja dengan pemerintah di negara-negara penghasil kayu untuk lebih memperkuat penyusunan dan penegakan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Dengan mendorong negara-negara produsen untuk memperjelas peraturan perundang-undangan mereka, rencana ini membantu perusahaan-perusahaan internasional untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Sangat penting bahwa rencana tersebut mengakui peran yang dapat dimainkan oleh negara-negara pengimpor kayu dalam memperkuat upaya-upaya ini: rencana ini melarang produk kayu ilegal untuk ditempatkan di pasar, dan mewajibkan operator yang menempatkan produk kayu mereka di pasar untuk terlebih dahulu melakukan uji tuntas. Kita sudah melihat negara-negara di seluruh dunia mulai menerapkan pendekatan serupa, misalnya China dan Australia.

Pendekatan ini adalah contoh bahwa para pelaku internasional dapat bekerja dengan otoritas negara untuk memperkuat penyusunan dan penegakan kerangka hukum nasional, yang berperan mendasar untuk meningkatkan perlindungan hutan dalam jangka panjang. Penguatan undang-undang tentang kehutanan dan penegakannya adalah alasan utama melambatnya deforestasi di hutan Amazon, Brazil, antara tahun 2004 sampai 2012¹⁰. Kepatuhan pada Pedoman Kehutanan Brazil saja dapat menghasilkan *peningkatan* tutupan hutan lebih dari 15% pada tahun 2050, jika ditegakkan dengan benar. Sama halnya, di Indonesia, penurunan laju deforestasi antara tahun 2012 sampai 2017 dihubungkan dengan penerapan moratorium nasional¹¹.

Pertanyaan utama untuk negara-negara seperti UK adalah bagaimana cara memberi insentif bagi semua orang yang terlibat dalam produksi komoditas-komoditas penting ini agar mereka mematuhi peraturan perundang-undangan di negara mereka dan meningkatkan keberlanjutannya?

Apa lagi yang dapat dilakukan?

Pada tahun 2019, kami meminta gugus tugas independen yang terdiri atas para pemimpin perusahaan, lembaga keuangan, dan masyarakat sipil untuk memberikan saran kepada Pemerintah tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh UK untuk membuat rantai pasokan menjadi lebih ramah lingkungan – gugus tugas ini diberi nama Global Resource Initiative. Gugus tugas ini berkonsultasi dengan lebih dari 200 perusahaan dan organisasi, dan menyerahkan laporan rekomendasi akhirnya pada Maret 2020¹². Gugus tugas ini menyadari bahwa ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh banyak orang dan pemerintah di negara-negara konsumen untuk membantu memperlambat hilangnya hutan, dengan menetapkan 14 tindakan praktis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah UK, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah akan memberikan tanggapan atas semua rekomendasi dalam laporan tersebut pada waktu yang tepat.

Konsultasi ini dirancang untuk menginformasikan tanggapan kami atas salah satu rekomendasi utama gugus tugas: apakah perusahaan-perusahaan wajib melakukan uji tuntas pada rantai pasokan mereka atau tidak.

UK menjadi negara besar pertama yang mengatur untuk menurunkan seluruh emisi gas rumah kaca menjadi nol pada tahun 2050. Pemerintah juga telah menerapkan kerangka kerja, melalui Pelaporan Energi dan Karbon yang Disederhanakan, yang mewajibkan perusahaan-perusahaan besar atau penting di UK untuk melaporkan emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi mereka dalam laporan tahunan untuk

tahun-tahun anggaran yang dimulai pada atau setelah 1 April 2019. Pemerintah UK adalah salah satu negara pertama di dunia yang mendukung rekomendasi akhir dari Gugus Tugas yang dipimpin oleh industri

dalam Pengungkapan Keuangan yang Terkait dengan Iklim (TCFD) pada tahun 2017, dan dalam Strategi Keuangan Ramah Lingkungan Pemerintah UK (dipublikasikan pada tahun 2019) disebutkan bahwa semua perusahaan dan

pemilik aset besar yang terdaftar harus mengungkapkan sesuai dengan rekomendasi TCFD pada tahun 2022.

Meskipun usulan yang disebutkan dalam konsultasi ini terkait dengan penurunan jejak lingkungan internasional UK, kami ingin memahami cara terbaik menyelaraskan ambisi kami dengan cara yang paling saling melengkapi untuk pelaksanaan dan pelaporan. Khususnya, kami tertarik untuk mengetahui sejauh mana peluang yang ada untuk menyelaraskan dengan pelaporan perusahaan-perusahaan berdasarkan standar internasional yang ada, termasuk rekomendasi TCFD.

Usulan

Usulan utama yang kami minta untuk Anda tanggapi melalui survei ini adalah sebagai berikut:

- Kami bermaksud memastikan bahwa komoditas hutan berisiko diproduksi secara sah dan berkelanjutan
- Kami mengusulkan untuk menerapkan undang-undang yang akan:
 - Mengilegalkan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam lingkup perundang-undangan untuk menggunakan, baik dalam produksi atau perdagangan di UK, komoditas hutan berisiko yang belum diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait di negara tempat komoditas tersebut ditanam
 - ‘Komoditas hutan berisiko’ mencakup komoditas yang terkandung dalam produk-produk
 - ‘Peraturan perundang-undangan terkait’ mencakup peraturan yang melindungi hutan alam dan ekosistem alam lain dari konversi ke lahan pertanian
 - Mewajibkan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam lingkup perundang-undangan untuk melakukan uji tuntas untuk memastikan agar komoditas hutan berisiko yang belum diproduksi secara sah tidak masuk dalam rantai pasokan mereka, dan untuk melaporkan praktik ini secara terbuka

- Memungkinkan Pemerintah mengenakan denda dan sanksi lazim lainnya terhadap perusahaan-perusahaan yang terus menggunakan komoditas hutan berisiko yang belum diproduksi secara sah dan/atau yang tidak memiliki sistem uji tuntas yang kuat
- Mewajibkan Pemerintah untuk melakukan evaluasi rutin atas efektivitas undang-undang
- Perusahaan-perusahaan besar yang melebihi ambang omzet dan jumlah karyawan akan masuk dalam lingkup undang-undang – perusahaan-perusahaan kecil tidak akan masuk dalam lingkup ini

Menggunakan undang-undang untuk menetapkan kewajiban perusahaan-perusahaan

Selama satu dasawarsa terakhir, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil telah berusaha keras untuk meningkatkan keberlanjutan komoditas hutan berisiko.

Terdapat bukti yang terus bertambah bahwa meskipun penting, semua langkah ini belum memadai untuk mengatasi masalah ini. Peraturan perundang-undangan memberikan mekanisme yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mewajibkan tindakan.

Oleh karena itu, Pemerintah mempertimbangkan untuk menerapkan undang-undang baru tentang rantai pasokan. Ini akan memberikan kejelasan dan konsistensi bagi perusahaan-perusahaan, dengan menetapkan kewajiban yang jelas secara hukum untuk pertama kalinya. Peraturan perundang-undangan memberikan sarana untuk membantu kami memastikan agar perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara berkelanjutan tidak dilemahkan oleh pihak lain, artinya yang dihukum karena melakukan hal yang benar.

Jika Pemerintah memutuskan untuk menetapkan undang-undang, kami bermaksud untuk menetapkan kerangka hukum dalam legislasi utama. Ini akan diikuti dengan undang-undang sekunder yang menetapkan ketentuan terperinci tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Undang-undang sekunder ini diperlukan agar undang-undang utama dapat berlaku. Undang-undang sekunder ini akan menjadi topik konsultasi selanjutnya, yang memberikan Anda kesempatan kedua untuk memberikan pendapat.

Mewajibkan perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa komoditas telah diproduksi secara sah

Kami mengusulkan untuk menerapkan peraturan yang akan mengilegalkan perusahaan-perusahaan untuk menggunakan, baik dalam produksi atau perdagangan di UK, komoditas hutan berisiko yang belum diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait di negara tempat komoditas tersebut ditanam. Perusahaan-perusahaan diwajibkan memiliki sistem uji tuntas yang kuat, dan melaporkannya, untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan tindakan yang proporsional untuk memastikan bahwa pasokan mereka sah.

Pendekatan ini dibuat untuk memperkuat upaya-upaya yang dilakukan negara-negara produsen untuk menegakkan peraturan perundang-undangan mereka, sehingga berkontribusi pada keberlanjutan seluruh produk yang mereka tanam, bukan hanya produk yang diekspor ke UK.

Ini menghindari berpindahnya produk yang tidak berkelanjutan ke pasar lain. Ini mencegah diskriminasi terhadap produsen yang mematuhi undang-undang dan mendorong praktik-praktik yang lebih baik, sekaligus tidak mengganggu penghidupan. Ini juga dirancang untuk mengatasi masalah yang dianggap oleh banyak pakar sebagai bentuk deforestasi yang paling merusak dan lazim, yaitu deforestasi secara ilegal.

Tingkat perlindungan hutan dalam undang-undang nasional bervariasi antarnegara. Juga benar bahwa standar internasional dan standar perusahaan untuk komoditas memang beragam. Memfokuskan peraturan kami untuk memastikan agar komoditas diproduksi dengan sepenuhnya mematuhi peraturan setempat mengirimkan pesan kepada pemerintah lain bahwa kami ingin mendukung upaya-upaya mereka untuk memastikan penggunaan sumber daya alam dari mereka secara berkelanjutan, sehingga memperkuat semangat kerja sama. Ini juga akan memberikan prinsip pengoperasian yang jelas bagi perusahaan-perusahaan.

Untuk pertama kalinya, pendekatan yang diusulkan akan memberikan standar minimum yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan, yaitu mereka harus mematuhi peraturan perundang-undangan terkait. Perusahaan-perusahaan tentu saja akan bebas menerapkan standar yang lebih tinggi, jika ada, untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan.

Peraturan perundang-undangan terkait

Usulan ini bertujuan untuk memastikan agar komoditas yang diproduksi mematuhi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hutan dari konversi ke lahan pertanian. Peraturan perundang-undangan ini yang akan masuk dalam lingkup untuk menentukan apakah sebuah komoditas telah diproduksi secara sah.

Penting untuk mengingat bahwa komoditas hutan berisiko dapat diproduksi di lahan yang dikonversi dari jenis ekosistem lain. Untuk menghindari situasi di mana dengan hanya berfokus pada peraturan perundang-undangan tentang kehutanan, para produsen diberi insentif untuk mengonversi jenis ekosistem lain, kami mengusulkan agar perusahaan-perusahaan harus memastikan bahwa mereka memproduksi komoditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melindungi ekosistem alam dengan lebih luas.

Menyasar perusahaan-perusahaan utama

Kami mengusulkan agar peraturan ini menyasar relatif sejumlah kecil perusahaan besar yang menggunakan komoditas hutan berisiko dalam produksi atau perdagangan di UK, dan yang memenuhi ambang jumlah karyawan dan omzet. Kami akan menetapkan ambang yang tepat dalam undang-undang sekunder.

Pendekatan ini akan memungkinkan kami untuk mengatur perusahaan-perusahaan yang paling mungkin mengirimkan sinyal positif kepada para produsen. Ini juga meminimalkan beban peraturan pada perusahaan-perusahaan kecil di UK yang tindakannya dalam rantai pasokan tidak akan memiliki dampak signifikan. Kami mengusulkan agar peraturan ini berlaku pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inggris, Irlandia Utara, Skotlandia, dan Wales. Skema yang ada dalam sektor bioenergi akan terus berlaku.

Pertanyaan-pertanyaan konsultasi

Bagian A: Tentang Anda

Pertanyaan ke-1: Siapa nama Anda?

Pertanyaan ke-2: Apa alamat email Anda?

Pertanyaan ke-3: Di negara mana Anda tinggal?

Pertanyaan ke-4: Apakah Anda ingin respons Anda diperlakukan rahasia?

- Ya
- Tidak

Pertanyaan ke-5: Apakah Anda merespons:

- Atas nama organisasi
- Sebagai individu

Bagian B: Tentang organisasi Anda

[Ingat, bagian ini hanya jika Anda merespons atas nama organisasi]

Pertanyaan ke-1: Jenis organisasi apa yang Anda wakili untuk merespons?

- Lembaga pemerintah
- Organisasi nonpemerintah
- Usaha kecil atau mikro (Kurang dari 50 karyawan)
- Usaha menengah (50 – 249 karyawan)
- Perusahaan besar (250 karyawan atau lebih)
- Asosiasi industri
- Merespons atas nama jenis organisasi lain

Pertanyaan ke-2: Cantumkan nama organisasi Anda.

Bagian C: Tentang bisnis Anda

[Ingat, bagian ini hanya untuk responden perusahaan] **Pertanyaan**

ke-1: Sektor apa yang paling menggambarkan perusahaan Anda?

- Pertanian, kehutanan, dan perikanan
- Pertambangan, penggalian, dan utilitas
- Manufaktur
- Konstruksi

- Perdagangan grosir dan ritel; reparasi kendaraan bermotor
- Transportasi dan penyimpanan (termasuk pos)
- Jasa akomodasi dan makanan
- Informasi dan komunikasi
- Keuangan dan asuransi
- Properti
- Profesional, ilmiah, dan teknis
- Administrasi niaga dan jasa penunjang
- Administrasi publik dan pertahanan
- Pendidikan
- Kesehatan
- Seni, hiburan, rekreasi, dan jasa-jasa lain

Pertanyaan ke-2: Di mana kantor pusat perusahaan Anda?

- Di UK
- Di luar negeri

Pertanyaan ke-3: Jika perusahaan Anda berkantor pusat di UK, sebutkan lokasinya.

- Tidak relevan
- Skotlandia
- Irlandia Utara
- Wales
- Timur Laut
- Barat Laut
- Yorkshire dan the Humber
- Midlands Barat
- Midlands Timur
- Barat Daya
- Tenggara
- Timur Inggris
- London Raya

Pertanyaan ke-4: Jika perusahaan Anda berkantor pusat di luar negeri, sebutkan negaranya.

Pertanyaan ke-5: Berapa orang karyawan di perusahaan Anda di UK?

- Tidak ada
- 1 - 49
- 50 – 249
- 250 – 499
- 500 – 1000
- Lebih dari 1000

Pertanyaan ke-6: Berapa orang karyawan di perusahaan Anda secara global?

- 1 - 49
- 50 – 249
- 250 – 499
- 500 – 1000
- Lebih dari 1000

Pertanyaan ke-7: Berapa omzet tahunan perusahaan Anda di UK?

- 0 sampai 10,2 juta GBP
- 10,2 juta sampai 36 juta GBP
- 36 juta sampai 100 juta GBP
- 100 juta sampai 500 juta GBP
- 500 juta sampai 1 miliar GBP
- 1 miliar GBP ke atas

Pertanyaan ke-8: Berapa omzet tahunan perusahaan Anda secara global? (asumsi 1 USD = 0,7837 GBP)

- 0 sampai 100 juta GBP
- 100 juta sampai 500 juta GBP
- 500 juta sampai 1 miliar GBP
- 1 miliar sampai 10 miliar GBP
- 10 miliar sampai 50 miliar GBP
- 50 miliar sampai 100 miliar GBP
- Lebih dari 100 miliar GBP

Pertanyaan ke-9: Komoditas hutan berisiko mana berikut ini yang Anda gunakan dalam produksi atau perdagangan di UK? Centang semua yang sesuai.

- daging sapi
- kakao
- kulit sapi
- kelapa sawit
- karet
- kedelai
- tidak ada satu pun dari pilihan di atas

Pertanyaan ke-10: Cantumkan komoditas hutan berisiko lain yang Anda gunakan dalam produksi atau perdagangan di UK.

Pertanyaan ke-11: Apakah saat ini Anda memiliki sistem untuk memastikan bahwa komoditas hutan berisiko mana pun berikut ini telah diproduksi secara sah? Centang semua yang sesuai.

- daging sapi
- kakao
- kulit sapi

- kelapa sawit
- karet
- kedelai
- tidak ada satu pun dari pilihan di atas

Pertanyaan ke-12: Cantumkan komoditas hutan berisiko lain untuk mana Anda memiliki sistemnya untuk memastikan bahwa komoditas tersebut telah diproduksi secara sah.

Pertanyaan ke-13: Jika Anda memiliki sistem untuk memastikan bahwa komoditas hutan berisiko telah diproduksi secara sah, jelaskan sistem tersebut.

Pertanyaan ke-14: Gunakan kotak ini untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang sistem-sistem yang Anda gunakan agar kami dapat lebih memahami cara produksi komoditas hutan berisiko dalam rantai pasokan Anda.

Bagian D: Tentang usulan

Pertanyaan ke-1: Haruskah Pemerintah menerapkan undang-undang yang dibuat untuk menjadikan komoditas hutan berisiko lebih berkelanjutan?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-2: Haruskah dianggap ilegal apabila perusahaan menggunakan komoditas hutan berisiko di UK yang belum diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-3: Haruskah perusahaan-perusahaan di UK diwajibkan untuk memiliki sistem uji tuntas untuk memastikan bahwa komoditas hutan berisiko yang mereka gunakan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-4: Haruskah perusahaan-perusahaan diwajibkan untuk melaporkan secara terbuka tentang sistem uji tuntas mereka?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-5: Haruskah Pemerintah dimampukan untuk mengenakan denda terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan komoditas hutan berisiko yang tidak diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait?

- Ya
- Tidak
- Tidak tahu

Pertanyaan ke-6: Haruskah undang-undang tersebut berlaku pada perusahaan-perusahaan besar, yang melebihi ambang omzet dan jumlah karyawan, yang menggunakan komoditas hutan berisiko dalam produksi atau perdagangan?

- Ya
- Tidak
- Lainnya

Pertanyaan ke-7: Jika Anda menjawab ‘Lainnya’ pada Pertanyaan ke-6, jelaskan lebih lanjut.

Pertanyaan ke-8: Perusahaan-perusahaan besar sudah memiliki kewajiban untuk melaporkan masalah iklim dan lingkungan hidup termasuk laporan yang terkait dengan emisi gas rumah kaca nol. Sejauh manakah terdapat peluang untuk menyelaraskan usulan yang disebutkan dalam konsultasi ini dengan pelaporan perusahaan-perusahaan berdasarkan kerangka internasional yang ada saat ini [misalnya rekomendasi dari Gugus Tugas Pengungkapan Keuangan yang Terkait dengan Iklim (TCFD)]?

Pertanyaan ke-9: Apakah Anda memiliki informasi atau komentar lebih lanjut yang Anda ingin kami ketahui?

Bibliografi

- 1 Forest Trends, '*Consumer Goods and Deforestation*' (2014)
- 2 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), '*The State of the World's Forests 2018*' (2018)
- 3 Pan et al., '*A Large and Persistent Carbon Sink in the World's Forests*' (2011)
- 4 Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), '*IPCC Fifth Assessment Report*' (2014)
- 5 Aerts R, and Honnay O, '*Forest restoration, biodiversity and ecosystem functioning*' (2011)
- 6 Kissinger G, Herold M, De Sy V, '*Drivers of Deforestation and Forest Degradation: A Synthesis Report for REDD+ Policymakers*' (2012)
- 7 Henderson K, Bauch C, Anand M, '*Alternative stable states and the sustainability of forests, grasslands, and agriculture*' (2016)
- 8 Foley J, DeFries R, Asner G, et al., '*Global Consequences of Land Use*' (2005)
- 9 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), '*The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services*' (2019)
- 10 Boucher D, Roquemore S, Fitzhugh E, '*Brazil's Success in Reducing Deforestation*' (2013)
- 11 Chen B, Kennedy C, Xu B, '*Effective moratoria on land acquisitions reduce tropical deforestation: evidence from Indonesia*' (2019)
- 12 Global Resource Initiative (GRI), '*Final Recommendations Report*' (2020). Dapat diperoleh di: <https://www.gov.uk/government/publications/global-resource-initiative-taskforce>